

PENURUNAN PERDAGANGAN BILATERAL INDONESIA-KOREA SELATAN DALAM KERJASAMA WORKING LEVEL TASK FORCE MEETING (WLTFM)

Belita Ayu Silviana Wibisono¹
Nim. 1302045100

Abstract

The purpose of this study to determine all factors that be problems for Bilateral Trade Decline between Indonesia and South Korea through Working Level Task Force Meeting (WLTFM). Research used explanative method, which calculated secondary data. Main concepts for this thesis used corporation and International Regime , from Robert O. Keohane and Stephen D. Krasner. The reason result in the decline of bilateral trade between Indonesia and South Korea was caused by Limited trade agreement, and policies of South Korea that must be ambitious for their country. Finally, this thesis showed the problem factors for decline of bilateral trade between Indonesia and South Korea is both of them did not pass three criteria of five criteria for processing International regime. They are egoistic self-interest, Norms & Principles, and Habit & Custom.

Keywords: *Bilateral Trade, WLTFM, Corporation and International Regime, Significance of the Regime.*

Pendahuluan

Hubungan antara Indonesia dengan Korea Selatan telah terjalin cukup lama, berawal dari pembukaan hubungan tingkat konsulat pada tahun 1966, hingga hubungan diplomatik tingkat duta besar yang mulai terjalin pada tahun 1973 (idn.mofa.go.kr). Seiring waktu kerjasama kedua negara mengalami peningkatan sejak dibentuknya *Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* yang di resmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Roh Moo Hyun yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2006 di Jakarta. Dalam deklarasi kerjasama strategis terdapat tiga pilar kerjasama, antara lain : pertama, kerjasama politik dan keamanan. Kedua, kerjasama sosial budaya. Ketiga, kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi.

Dalam pilar kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi, pemerintah Indonesia dan Korea Selatan secara nyata membentuk *Indonesia-Korea Joint Task Force on Economic Cooperation (JTF-EC)* pada tahun 2007. Pada tahun 2010 JTF-EC kemudian direvitalisasi menjadi *Working Level Task Force Meeting (WLTFM)*.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : ayu.belita@yahoo.co.id

Pembaruan tersebut dilakukan karena pemerintah Indonesia dan Korea Selatan ingin merealisasikan kerjasama secara nyata dan konkrit melalui program MP3EI.

Selama pelaksanaan WLTFM, pada tanggal 25 September 2013 di Seoul Korea Selatan, menghasilkan sembilan perencanaan utama kerjasama ekonomi, yaitu : kelompok kerja perdagangan dan investasi, kelompok kerja industri, kelompok kerja energi dan sumber daya mineral, kelompok kerja konstruksi dan infrastruktur, kelompok kerjasama lingkungan, kelompok kerja pertanian, kehutanan, dan perikanan, kelompok kerja industri pertahanan, kelompok kerja pembiayaan pembangunan, dan kelompok kerja mobil ramah lingkungan (kbriseoul.kr/kbriseoul/index).

Dari sembilan kelompok kerja tersebut, tiga diantaranya telah terealisasi. Dua kelompok kerja telah berjalan dengan baik, yaitu pada kelompok kerja industri. Antara Indonesia dan Korea Selatan menjalin kerjasama industri tekstil dengan tenaga ahli dari Korea (www.kemenperin.go.id). Pada kelompok kerja energi dan sumber daya mineral, Indonesia dan Korea Selatan menjalin kerjasama dalam kerangka *Indonesia – Korea Energy Forum (IKEF)* (www.esdm.go.id). Namun, pada kelompok kerja perdagangan dan investasi, selama lima tahun terakhir, neraca perdagangan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan mengalami penurunan yaitu pada tahun 2011-2015. Jumlah ekspor Indonesia ke Korea Selatan mengalami penurunan sebesar US\$ 8,799,058 dan jumlah impor Indonesia dari Korea Selatan mengalami penurunan sebesar US\$ 4,572,544. Komoditi ekspor utama Indonesia ke Korsel yang mengalami penurunan adalah bahan bakar mineral mentah, karet, peralatan mesin listrik, bijih dan terak. Sejalan dengan itu, jumlah ekspor Korea Selatan ke Indonesia juga mengalami penurunan sebesar US\$ 5,689,259 dan jumlah impor Korea Selatan dari Indonesia menurun sebesar US\$ 8,363,814. Komoditi utama Korea Selatan yang mengalami penurunan adalah produk penyulingan bahan bakar mineral, besi dan baja, peralatan mesin listrik, dan mesin peralatan mekanik.

Kondisi ini menjadi hal yang menarik karena seharusnya kerjasama WLTFM ini mampu mendorong peningkatan volume perdagangan kedua negara sesuai dengan tujuan awalnya yaitu memberikan hasil yang baik dalam peningkatan ekonomi. Namun, yang terjadi secara nyata berbanding terbalik dimana nilai perdagangan keduanya mengalami penurunan lima tahun secara berturut-turut.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Kerjasama dan Rezim Internasional (Cooperation and International Regimes)

Menurut Robert O. Keohane, rezim internasional dapat dipahami sebagai sebuah alat untuk memfasilitasi pembuatan kesepakatan yang bersifat substantif dalam dunia politik dengan ruang lingkup lintas negara yang memfasilitasi kesepakatan melalui penyediaan norma, prinsip, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan implisit maupun eksplisit (Richard Little and Michael Smith: 2006).

Signifikansi Rezim menurut Stephen D. Krasner memaparkan adanya struktur variabel-variabel kausal dasar yang dapat digunakan untuk melihat hubungan sebab-akibat antara faktor-faktor tertentu dengan keberadaan suatu rezim internasional.

Krasner berpendapat, rezim internasional dapat dilihat sebagai variabel penghubung antara variabel-variabel kausal dasar dengan hasil akhir. Model struktur yang digambarkan dibawah ini :

Gambar 1.1 Model Variabel Penghubung antara Variabel-variabel Kausal Dasar dengan Hasil Akhir atau Perilaku yang Muncul



Rezim Internasional menurut Krasner merupakan sesuatu yang bersifat *dependent* karena dipengaruhi oleh variabel-variabel kausal dasar yang saling terhubung dan mempengaruhi hasil akhir atau perilaku yang muncul (Stephen D. Krasner: 1983). Variabel kausal dasar menurut Krasner terbagi menjadi lima yaitu : 1) *Egoistic self-interest*, 2) *Political Power*, 3) *Norms & Principles*, 4) *Habit & Custom*, 5) *Knowledge*. Tiga variabel yang disebutkan di awal merupakan variabel inti, dan dua yang lainnya merupakan variabel pelengkap. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci per variabel :

1. *Egoistic self-interest*

Variabel ini menjelaskan tentang kepentingan individu dari aktor didalam dunia internasional yang didasarkan pada sifat dasar manusia yaitu egois. Kepentingan individu ini merupakan keinginan aktor untuk memaksimalkan kepentingan tanpa menguntungkan pihak lain.

2. *Political Power*

Variabel ini mengartikan tentang kekuatan politik yang dimiliki setiap aktor. Kekuatan politik disini terbagi menjadi dua yaitu: pertama, kekuatan politik yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk pertahanan, kesejahteraan, fasilitas umum, dan lain-lain. Kedua, kekuatan politik yang digunakan sebagai instrumen dalam memenuhi kepentingan pihak tertentu. Biasanya untuk memenuhi kepentingan negara yang kuat, yang digunakan untuk menciptakan rezim yang bisa memenuhi tujuan tertentu yang telah diaturnya, dimana negara mitra lainnya tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti pilihan tersebut.

3. *Norms & Principles*

Variabel ini merupakan karakteristik dari suatu rezim. Konteks dalam nilai-nilai didalamnya yang terkandung, standar perilaku yang ditetapkan dalam hak dan kewajiban yang harus dilakukan karena keharusan serta kepercayaan atas fakta, penyebab, dan kejujuran. Menyediakan standarisasi yang spesifik mengenai aturan perilaku.

4. *Habit & Custom*

Variabel ini menurut Krasner, sebagai pola perilaku yang berdasarkan pada kondisi nyata dan kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku yang didasari oleh sifat egois yang mengutamakan kepentingan pribadi yang diterapkan oleh aktor-

aktor dalam dunia internasional kemudian menghasilkan sebuah dilema. Dilema tersebut dialami seluruh aktor yang menjadikan hal tersebut sebagai permasalahan bersama, yang kemudian diakhiri sebagai kesamaan harapan akan penyelesaian permasalahan. Sehingga *Habit & Custom* secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan rezim.

5. Knowledge

Variabel ini menjelaskan mengenai tersedianya informasi dan teori, jenis pengetahuan apapun yang memberikan keuntungan. Dalam sistem Internasional, keuntungan dapat dirasakan oleh para pembuat kebijakan. Informasi yang diketahui dapat memberikan pertimbangan dan keputusan dengan lebih baik. Seperangkat aturan yang berlaku dalam suatu rezim tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan berbagai informasi karena ilmu pengetahuan sebagai dasar dari penerapan kebijakan, begitu juga dengan perilaku negara yang juga ditentukan oleh pengetahuan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif. Data yang digunakan menggunakan data sekunder. Serta metode pengumpulan data yang digunakan secara komprehensif dalam penelitian ini menggunakan *library research*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara metode kualitatif, yaitu metode yang menggambarkan hasil yang didapatkan tanpa menggunakan hitungan angka dan rumus statistika, serta menganalisis dari sumber yang telah diperoleh dan mengaplikasikan teori pada kondisi faktual. Data yang diperoleh dari studi literatur dan dokumen ini kemudian dianalisis menggunakan teori dan konsep yang saling berkaitan satu sama lain dengan obyek yang akan diteliti.

Hasil Penelitian

Hubungan Ekonomi Indonesia - Korea Selatan

Awal hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan tahun 1958 kurang berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena kedua negara merupakan korban Perang Dingin yang memiliki ideologi berbeda. Pertentangan terjadi antara kedua pemimpin negara. Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno saat itu, cenderung berpihak kepada Blok Beijing yang memiliki ideologi kiri atau sosialisme dan bersikap keras terhadap blok kapitalisme. Berbanding terbalik dengan pemimpin Korea Selatan yaitu Presiden Rhee Syngman yang berpihak pada Blok Barat, karena pada saat itu pemerintah Korea Selatan didukung oleh Amerika Serikat.

Seiring berjalannya waktu, Korea Selatan telah beganti kepemimpinan, yaitu Presiden Park Chung-Hee. Pada kepemimpinan Presiden Park, Korea Selatan mulai melakukan pendekatan terhadap Indonesia untuk menjalin hubungan kenegaraan secara resmi. Terdapat pertemuan singkat antara Kim Jong-Pil dengan Presiden Soekarno, Kim Jong-Pil menyampaikan bahwa sifat pemerintah Korsel yang baru berbeda dengan pemerintahan sebelumnya dan menganjurkan membuka hubungan kenegaraan secara resmi antara Indonesia dan Korsel. Pemerintah Indonesia tidak keberatan untuk menjalin hubungan diplomatik, tetapi untuk sementara waktu hubungan yang terjalin merupakan tingkat perwakilan konsuler. Penandatanganan pada bulan Mei 1966 menandai dimulainya hubungan tingkat konsuler antara Indonesia dan Korea Selatan.

Seiring dengan diresmikannya hubungan konsuler kedua negara, kantor konsulat Jenderal Republik Korea dibuka secara resmi di Jakarta pada tanggal 1 Desember 1966 dan disusul dengan pembukaan Konsulat Jenderal Indonesia di Seoul pada 1 Juni 1968 (Yang Seung-Yoon: 2005).

Hubungan kedua negara mulai mengalami kemajuan, Indonesia dan Korea Selatan bersepakat untuk mengadakan pertemuan secara intensif dan menyetujui peningkatan hubungan pada tingkat diplomatik penuh pada tanggal 18 September 1973 (idn.mofa.go.kr). Dengan persetujuan ini, Konsulat Jenderal kedua negara berubah menjadi Kedutaan Besar Republik Korea (KBRK) dan Kedutaan Besar republik Indonesia (KBRI).

Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1975 – 1980 hubungan kerjasama kedua negara lebih ditingkatkan dengan serangkaian kunjungan pemimpin dari Indonesia dan Korea Selatan. Kunjungan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, Menteri Pertambangan, Menteri Pekerjaan Umum dan sebagainya. Pada tahun 1981-1994, Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto menunjukkan perubahan hubungan kedua negara yang positif. Kunjungan kenegaraan semakin intensif dilakukan meskipun Korea Selatan telah berkali-kali berganti pemimpin. Pada tahun 2000-2002, Indonesia yang dipimpin oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga melakukan serangkaian kunjungan kenegaraan dengan Korea Selatan. Pemimpin Indonesia selanjutnya yaitu Presiden Megawati juga menunjukkan peningkatan hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan ke arah yang positif. Kerjasama sebelumnya bersifat umum, kali ini berkembang menjadi kerjasama ekonomi dalam bidang-bidang khusus. Kerjasama dalam bidang khusus antara Indonesia dan Korea Selatan diantaranya pembangunan proyek Jalan Raya Padang dan Proyek Pengembangan Unit Pelatihan Keliling.

Pada tahun 2004 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggantikan Presiden Megawati memimpin Indonesia. Pada masa pemerintahannya, Presiden SBY melakukan kunjungan ke Busan pada tanggal 18-19 November 2005 dengan agenda menghadiri *APEC Economy Leaders Meeting* dan mengadakan pertemuan *Joint Commission* di Seoul pada tanggal 9 Juni 2006. Pertemuan *Joint Commission* ini yang kemudian menjadi awal dari kerjasama strategis antara Indonesia dan Korea Selatan. Adanya pertemuan lanjutan yang dilakukan dalam kunjungan Presiden Roh Moo-Hyun ke Jakarta pada tanggal 3-5 Desember 2006. Dalam pertemuan ini kedua negara bersepakat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan membuka kemitraan strategis dalam penandatanganan *Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century*.

Kerjasama Working Level Task Force Meeting (WLTFM)

Kerjasama kemitraan strategis *Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* yang ditandatangani dan diresmikan oleh kedua pemimpin negara yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Roh Moo Hyun yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2006 di Jakarta (kbriseoul.kr/kbriseoul/index). Deklarasi tersebut berisikan tiga pilar kerjasama yaitu : pertama, kerjasama politik dan keamanan, yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di wilayah kawasan Asia. Kedua, kerjasama sosial budaya,

yang bertujuan untuk mempromosikan kebudayaan dan keunggulan pariwisata yang dimiliki oleh kedua negara. Ketiga, kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi, yang bertujuan untuk membebaskan kedua negara dari keterbelakangan ekonomi dan diharapkan mampu memberikan hasil yang baik dalam peningkatan ekonomi.

Kerjasama kongkrit yang dilakukan Indonesia dan Korea Selatan, dalam pilar kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi dibentuklah *Indonesia-Korea Joint Task Force on Economic Cooperation (JTF-EC)* pada tanggal 30 April 2007. Dilanjutkan pada pertemuan *Joint Task Force* ke-2 pada tanggal 25 Maret 2010 di Seoul, Korea Selatan. Pertemuan tersebut berisikan agenda penandatanganan *MoU Business Agreement on the Research Project to Assess Indonesian Shipbuilding Industry and Recommend Changes for Improvement* dan *MoU* tentang Kerjasama Standarisasi antara Badan Standarisasi Nasional kedua negara yang disaksikan langsung oleh kedua Menteri.

Pada tahun berikutnya tepat pada tanggal 18 Mei 2011 di Bali diadakan pertemuan *Joint Task Force* ke-3 sekaligus menjadi pertemuan *WLTFM* yang pertama. Dalam pertemuan ini Indonesia dan Korea Selatan sepakat untuk merevitalisasi *Indonesia-Korea Joint Task Force on Economic Cooperation (JTF-EC)* menjadi *Working Level Task Force Meeting (WLTFM)*. Revitalisasi tersebut dilakukan untuk merealisasikan dan menjalankan rencana kerja yang telah disepakati melalui kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Tujuannya untuk pemerataan pembangunan nasional, kerjasama investasi Korea Selatan di Indonesia akan dijalankan sesuai wilayah yang potensial dan strategis sesuai koridor-koridor dalam MP3EI.

Pada tahun yang sama tanggal 24 Oktober di Seoul diadakan pertemuan *WLTFM* kedua. Pertemuan ini dipimpin Deputy Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional dari pihak Indonesia dan *Deputy Minister for International Affairs, Ministry of Knowledge Economy* dari pihak Korsel yang menyepakati *Economic Cooperation Goals* yaitu melanjutkan pembahasan pencapaian volume perdagangan US\$ 100 juta pada tahun 2020 (ppid.kemendag.go.id). Penetapan pencapaian target tersebut didukung oleh kajian ilmiah yang dilakukan oleh pihak koresel yang bertajuk *Bilateral Trade Vision between Indonesia-Korea* yang berisikan potensi, hambatan, dan usulan solusi hubungan perdagangan dan investasi untuk mencapai target 2014 dan 2020.

Pertemuan *WLTFM* ketiga dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2012 di Jakarta. Agenda dalam pertemuan ini adalah peresmian sekretariat bersama yang bertujuan memonitor implementasi dari berbagai kesepakatan yang dicapai oleh setiap *Working Group*.

Pertemuan *WLTFM* keempat dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2012 di Jeju, Korea Selatan. Agenda pertemuan ini adalah disepakatinya *Joint Declaration of Jeju Initiative* yang bertujuan memperkuat kerjasama bilateral ekonomi kedua negara dengan mengontrol dan mengkoordinir *Indonesia-Korea Joint Committee On Economic Cooperation*, *WLTFM* dan Sekretariat Bersama (www.ekon.go.id).

Pertemuan WLTFM kelima dilaksanakan pada tanggal 25 September 2013 di Seoul, Korea Selatan. Pertemuan rutin yang diadakan ini menghasilkan perencanaan utama yang sebelumnya memiliki kelompok kerja didalam delapan sektor kemudian dikembangkan menjadi sembilan sektor, yaitu kelompok kerja perdagangan dan investasi, kelompok kerja industri, kelompok kerja energi dan sumber daya mineral, kelompok kerja konstruksi dan infrastruktur, kelompok kerjasama lingkungan, kelompok kerja pertanian, kehutanan, dan perikanan, kelompok kerja industri pertahanan, kelompok kerja pembiayaan pembangunan, dan kelompok kerja mobil ramah lingkungan.

Pertemuan WLTFM yang keenam dilaksanakan pada tanggal 29 September 2014 di Seoul. Pertemuan ini membahas proyek kerjasama yang telah berlangsung sebelumnya dan proyek baru yang dikerjasamakan. Terdapat 10 proyek utama diantaranya Kerjasama Industri Perkapalan, Kerjasama mesin-mesin pertanian, dan di sektor ekonomi akan dilaksanakan kerjasama kawasan ekonomi khusus. Kedua negara juga sepakat untuk memperpanjang *Terms of Reference* (TOR) pembentukan *Joint Secretariat* untuk menjembatani kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara agar terus berjalan efektif guna mencapai keberhasilan kinerja yang disepakati.

Di antara sembilan kelompok kerja tersebut, tiga diantaranya telah terealisasi yaitu kelompok kerja perdagangan dan investasi, kelompok kerja industri, serta kelompok kerja energi dan sumber daya mineral. Di dalam tiga kelompok kerja yang telah terlaksana, dua diantaranya berjalan dengan baik, tetapi satu kelompok kerja yaitu kelompok kerja perdagangan dan investasi cenderung menunjukkan hasil yang tidak memuaskan. Terjadinya defisit perdagangan karena dipengaruhi oleh menurunnya neraca perdagangan kedua negara selama lima tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2011-2015.

Penurunan Perdagangan Bilateral Pasca WLTFM

perdagangan kedua negara mencapai puncaknya pada tahun 2011. Total perdagangan tercatat mencapai US\$ 12,31 miliar meningkat sebesar 32,26% dibandingkan periode 2010, dengan total perdagangan hanya mencapai US\$ 9,31 miliar (www.kemendag.go.id). Persentase kenaikan dibandingkan periode 2010 untuk ekspor sebesar 53,09% dan untuk impor naik sebesar 19,83%.

Pada tahun selanjutnya total perdagangan Indonesia dan Korea Selatan mencapai angka US\$ 12,92 miliar atau meningkat sebesar 5,21% dibanding periode tahun 2011 (www.kemendag.go.id). Nilai ekspor Indonesia meningkat sebesar 1,80% dan nilai impor Indonesia meningkat 9,72% dari periode tahun lalu.

Namun pada periode tahun 2013 total perdagangan kedua negara sebesar US\$ 24.762,59 juta, mengalami penurunan sebesar 16,43% dibandingkan tahun 2012. Perdagangan yang terdiri dari ekspor Indonesia sebesar US\$ 13.188,48 juta atau turun sebesar 15,87% dan impor Indonesia dari Korea Selatan sebesar US\$ 11.574,12 juta atau mengalami penurunan sebesar 17,06% (www.kemendag.go.id).

Pada tahun 2014, total neraca perdagangan Indonesia dan Korea Selatan sebesar US\$ 23.688,14 juta turun sebesar 4,32% dibanding periode sebelumnya. Total ekspor

Indonesia ke Korea Selatan sebesar US\$ 12.271,10 juta atau mengalami penurunan sebesar 6,97% dan total impor sebesar US\$ 11.417,04 juta dan menurun sebesar 1,31% dari periode tahun sebelumnya (www.kemendag.go.id).

Perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan selama dua tahun terakhir terus mengalami penurunan, dan penurunan perdagangan kedua negara mencapai puncaknya pada tahun 2015. Total perdagangan kedua negara pada periode tahun ini sebesar US\$ 16,73 miliar, turun sebesar 29,2% lebih besar dibandingkan dua tahun terakhir. Total ekspor hanya sebesar US\$ 8,85 miliar turun 14,6%, dan total impor 7,87 miliar turun sebesar US\$ 30,7% (www.kemendag.go.id).

Tindakan yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea selatan dalam menangani masalah penurunan perdagangan bilateral pada kelompok kerja perdagangan dan investasi adalah menyepakati peningkatan perdagangan bilateral dengan menargetkan neraca perdagangan mencapai US\$ 100 milyar pada tahun 2020. Pencapaian target perdagangan ini didukung oleh rencana kedua negara untuk membentuk *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA).

Pembentukan *Joint Study Group* (JSG) dan *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA)

Joint Study Group (JSG) dan *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) dibentuk bertujuan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan yang sedang mengalami penurunan. Anggota JSG terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan praktisi bisnis perwakilan dari kedua negara. Pembentukan JSG bertujuan untuk meneliti dan merundingkan rekomendasi pembentukan dari IK-CEPA.

Hasil perundingan JSG Group merekomendasikan pembentukan IK-CEPA antara Indonesia dengan Korea Selatan, karena dari penelitian, perundingan, dan perhitungan JSG *Group*, *Indonesia's welfare* dan *GDP growth* akan mencapai nilai US\$ 10.6 miliar dan 4,37%. Sementara Korea akan memperoleh US\$ 1,5 miliar *welfare increase* dan 0,31% *GDP increase* (Mahyar Diani: 2014).

Pertemuan *Nuclear Security Summit* pada 28 Maret 2012 di Seoul antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Lee Myung-bak. Pertemuan ini menjadi awal dimulainya perundingan IK-CEPA secara resmi. Pada pertemuan pertama IK-CEPA telah disepakati bahwa Perundingan IK-CEPA terbagi menjadi 7 (tujuh) *Working Groups* (WG) yaitu (www.kemendag.go.id) : 1) *WG on Trade in Goods* (Perdagangan Barang); 2) *WG on Rules of Origin Customs Procedures and Trade Facilitation* (tentang Ketentuan Asal, Bea Cukai Prosedur dan Fasilitasi Perdagangan); 3) *WG on Services* (Jasa); 4) *WG on Investment* (investasi); 5) *WG on Rules* (aturan); 6) *WG on Cooperation including/and/Capacity Building* (Kerjasama termasuk dalam *capacity building*) dan 7) *WG on Legal and Institutional Issues* (hukum dan isu kelembagaan). Sedangkan lingkup dan cakupan IK-CEPA yang disepakati antara lain : Perdagangan Barang, Ketentuan Asal, Bea Cukai (termasuk seperti Tatalaksana Kepabeanan) dan Perdagangan Fasilitas, Perdagangan Jasa, Investasi, Hak Kekayaan Intelektual, Pengembangan Ramah Lingkungan, Dan Kompetisi.

Pembangunan Energi Alternatif Terbarukan di Korea Selatan

Pemerintah Korea Selatan melakukan pembangunan energi alternatif terbarukan termasuk dalam variabel kausal dasar *Egoistic self-interest*, karena menurut Krasner, *Egoistic self-interest* adalah pencapaian kepentingan aktor dalam dunia internasional yang bersifat egois dan ingin memaksimalkan fungsi utilitas tanpa menguntungkan pihak lain. Korea Selatan bersifat egois untuk mencapai kepentingan negaranya tanpa menguntungkan pihak lain. Posisi pihak lain adalah Indonesia sebagai mitra kerjasama WLTFM.

Keputusan yang diambil oleh Korea Selatan adalah mengurangi perdagangan migas yang menjadi kebutuhan utamanya. Korea Selatan telah mempersiapkan alternatif energi terbarukan agar dapat keluar dari ketergantungan atas produk migas yang salah satu mitranya adalah Indonesia. Jadi, ketika salah satu partisipan atau aktor yang terlibat di dalam rezim internasional hanya mengutamakan dan memprioritaskan kepentingannya, maka perilaku Korea Selatan secara tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan rezim WLTFM, yang kemudian memberikan pengaruh pada *Related Behavior & Outcomes* (Perilaku dan hasil yang muncul) yaitu terjadinya penurunan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan.

Upaya Korea Selatan dalam proses membuat keputusan lebih menerapkan pilihan untuk strategi diversifikasi sumber energi nuklir dan energi terbarukan. Dalam diversifikasi dan mengurangi ketergantungan Korea Selatan telah berinvestasi pada energi nuklir yang diterapkannya di dalam negeri, meskipun hanya mencakup 14% dengan 20 pembangkit listrik dari seluruh energi yang dikonsumsi. Korea Selatan tetap optimis dengan enam reaktor yang masih dalam tahap pembangunan oleh *The Korea and Nuclear* maka pada tahun 2030, 60% dari seluruh pembangkit listrik di Korea Selatan menggunakan tenaga nuklir (yonseijournal.files). Ketika pembangunan tenaga alternatif ini dijalankan, Korea Selatan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga Korea Selatan tidak lagi tergantung pada migas Indonesia yang kemudian mempengaruhi kerjasama kedua negara dalam kerangka WLTFM.

Batasan Peraturan Normal Track, Sensitive List dan Highly Sensitive List (HSL) dalam Perjanjian Perdagangan Barang

Batasan *Normal Track, Sensitive List dan Highly Sensitive List* dalam aturan perdagangan barang Rezim Internasional kerjasama WLTFM yang berlaku pada, “kesepakatan kerangka kerjasama ekonomi yang komprehensif antara pemerintah negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea” atau perjanjian perdagangan (AKFTA). Aturan *Normal Track* (NT) adalah penentuan penurunan kategori produk berdasarkan sensitivitasnya yang telah siap menghadapi liberalisasi sehingga penurunan bea masuknya diterapkan dengan cepat. Produk NT dikenai bea masuk sebesar 0-5%. Aturan *Sensitive List* (SL) dan *Highly Sensitive List* (HSL) adalah penentuan penurunan kategori produk berdasarkan sensitivitasnya yang belum siap menghadapi liberalisasi sehingga penurunan bea masuknya diterapkan dalam waktu lambat. Produk SL dikenai bea masuk sebesar 20%, sedangkan untuk produk HSL dikenai bea masuk sebesar 50% (www.kemenkeu.go.id).

Berdasarkan peraturan kerangka perjanjian kerjasama ekonomi menyeluruh antara Indonesia dan Korea Selatan secara progresif menyepakati suatu skema penurunan dan penghapusan tarif/bea masuk dan regulasi lain (non-tarif). Kesepakatan tersebut kemudian masuk ke dalam *Basic Causal Variables* yaitu *Norm & Principles*. Menurut Krasner, Norma dan Prinsip yang berlaku berisikan nilai-nilai yang didalamnya terkandung, standar perilaku yang ditetapkan dalam hak dan kewajiban yang harus dilakukan karena keharusan serta kepercayaan atas fakta, penyebab, dan kejujuran. Indonesia dan Korea Selatan harus mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan rezim perdagangan bebas tersebut, yaitu Korea Selatan menghapus tarif kategori *Normal Track* sebesar 0% untuk produk ekspor Indonesia ke Korea Selatan yang meliputi produk binatang hidup, ikan, sayuran, minyak sawit, produk kimia, produk kertas, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kulit, dan produk kayu. Sebagai timbal balik dari penghapusan produk ekspor Indonesia ke Korea Selatan, Indonesia harus menjalankan skema konsesi tarif penurunan menjadi 0-5% sejak perjanjian barang efektif berlaku.

Skema penurunan yang ditetapkan dengan tarif/bea masuk 0-5% dalam norma dan prinsip yang dijalankan oleh Indonesia, secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan rezim WLTFM, karena aturan tersebut bersifat mengikat Indonesia yang harus mengenakan tarif/bea masuk produk ekspor Korea Selatan ke Indonesia sebesar 0-5%. Sedangkan dari pihak Korea Selatan yang mengenakan bea masuk sebesar 50% sesuai dengan kategori produk *Highly Sensitive List* (HSL). Dalam penentuan produk HSL Korea Selatan dapat memilih produk tertentu Indonesia dan sebaliknya, sesuai total nilai impor berdasarkan statistik perdagangan tahun 2004 dari Korea Selatan dan sebaliknya. Produk yang termasuk dalam HSL antara lain perikanan, beras, gula, *wine-alcohol*, produk kimia, tekstil dan baja. Norma yang ditetapkan ini kemudian menjadi kesempatan bagi Korea Selatan untuk memanfaatkan penentuan harga pada kategori produk HSL. Norma memberikan pilihan untuk menentukan bea masuk hingga 50% pada kategori produk HSL, yang kemudian dimanfaatkan secara tidak berkeadilan oleh Korea Selatan untuk kepentingan sepihak. Hal ini kemudian mempengaruhi perkembangan rezim WLTFM, yang kemudian memberikan pengaruh pada *Related Behavior & Outcomes* (Perilaku dan hasil yang muncul) yaitu terjadinya penurunan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan.

Upaya Indonesia dan Korea Selatan Meningkatkan Perdagangan Bilateral Melalui Pembentukan IK-CEPA

Penurunan perdagangan bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Korea Selatan, ditanggapi oleh pemerintah kedua negara dengan membentuk IK-CEPA. Hal ini menurut Stephen D. Krasner adalah sebagai pola perilaku yang berdasarkan pada variabel kausal dasar *Habit & Custom*, yaitu kondisi nyata dan kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku yang didasari oleh sifat egois yang mengutamakan kepentingan pribadi. Seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam membangun energi alternatif terbarukan yang mengurangi perdagangan migas dengan Indonesia, sedangkan produk migas adalah salah satu komoditas utama perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan, kemudian memunculkan dilema atau permasalahan bersama yaitu terjadinya penurunan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. Dilema tersebut kemudian diakhiri dengan pencarian solusi sebagai kesamaan

harapan akan penyelesaian permasalahan. Penyelesaian permasalahan pada penurunan perdagangan bilateral Indonesia dan Korea adalah dengan menyepakati pembentukan IK-CEPA.

Dalam kerjasama *capacity building* dimana klausul yang diajukan oleh Indonesia yaitu pembangunan fasilitas dan infrastruktur, enggan disetujui dan dicoret dari *draft plan of action* (PoA) oleh Korea Selatan (ppid.kemendag.go.id). Selain itu, Pihak Korea telah membuka 376 pos tarif dan mengajukan *klausul* kepada Indonesia untuk membuka 114 pos tarif, serta meringankan bea masuk barang menjadi 0%. Sementara Indonesia telah membuka 226 pos tarif dan menginginkan Korea Selatan untuk membuka kembali 81 pos tarif (www.kemenperin.go.id). Pihak Indonesia dalam negosiasi telah menyetujui klausul Korea dengan membuka bea masuk barang menjadi 0%, asalkan dengan jaminan komitmen dari Korea Selatan untuk meningkatkan investasi di dalam sektor industri strategis, seperti elektronika, telekomunikasi, dan petrokimia. Namun pihak Korea tidak menyetujui klausul Indonesia dengan alasan bahwa investasi yang diinginkan oleh Indonesia merupakan *private sector comitment* yaitu badan usaha yang tidak dimiliki oleh negara, negara tidak berwenang untuk memaksakan kehendak badan usaha tersebut untuk berinvestasi di Indonesia.

Pertemuan IK-CEPA ini telah memasuki putaran ketujuh, namun belum adanya kemajuan yang terjadi dari setiap pertemuan yang berlangsung. Negosiasi yang dilakukan pada tahun 2012 hingga tahun 2014 dihentikan sementara oleh kedua pihak, karena belum berhasil menyelesaikan *package deal* yaitu belum tercapainya sinkronisasi antara tuntutan dan penawaran (*Offer and Request*) dari kedua pihak. Adanya isu-isu yang belum mencapai kesepakatan antara Indonesia dan Korea Selatan di dalam *draft text* perjanjian IK-CEPA.

Kesimpulan

Pertama, standar perilaku yang ditetapkan oleh pemerintah Korea Selatan termasuk dalam *Egoistic self-interest*. Mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan pembangunan tenaga alternatif, untuk mengejar pemenuhan kepentingan dan hak negaranya. Mempengaruhi perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan karena komoditi unggulan Indonesia ke Korea Selatan adalah produk migas. Apabila pembangunan tenaga alternatif tersebut selesai maka Korea Selatan mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar migas tanpa harus mengimpor dari Indonesia.

Kedua, perjanjian perdagangan barang yang digunakan sebagai acuan mengatur jalannya kerjasama ekonomi oleh Indonesia dan Korea Selatan yang bersifat membatasi termasuk dalam *Norm & Principles*. Membatasi dalam arti, aturan penentuan bea masuk produk Indonesia ke Korea Selatan sebesar 0-5% aturan tersebut tercantum didalam AKFTA, dalam mengimplementasikan peraturan perdagangan barang. Sedangkan Korea Selatan mengenakan tarif bea masuk barang 50% terhadap produk Indonesia yang bersifat *Highly Sensitive List* (HSL). Batas maksimum 200 pos tarif (HS 6-digit) atau 3% dari keseluruhan pos tarif (berdasarkan HS digit yang dipilih) dan 3% dari total nilai impor individu negara-negara ASEAN dari Korea Selatan dan sebaliknya berdasarkan statistik perdagangan. Hal ini memberatkan eksportir karena tarif yang terlalu tinggi.

Ketiga, Upaya meningkatkan neraca perdagangan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan untuk membentuk IK-CEPA termasuk dalam variabel kausal dasar *Habit & Custom*. Upaya mengatasi dilema atau permasalahan bersama dikarenakan sifat egois aktor, aktor disini adalah Korea Selatan dalam rezim WLTFM, yaitu membangun energi alternatif terbarukan yang mempengaruhi perdagangan minyak mentah yang menjadi salah satu komoditas utama Indonesia. Kesamaan harapan dan penyelesaian permasalahan penurunan perdagangan bilateral kedua negara adalah dengan sepakat untuk membentuk IK-CEPA. Bertujuan untuk mengatasi dan meningkatkan neraca perdagangan kedua negara. Namun, hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan Indonesia dan Korea Selatan, karena perundingan IK-CEPA ini dihentikan sementara oleh kedua negara dan dalam perundingan ini tidak tercapai *package deal*.

Setelah pergantian rezim di Indonesia, yang sebelumnya dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian digantikan oleh Presiden Joko Widodo. Mempengaruhi perkembangan kerjasama WLTFM, karena setelah Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden, forum kerjasama WLTFM tidak lagi aktif mengadakan perundingan dan pertemuan. Melainkan forum *Indonesia-Korea Joint Committee on Economic Cooperation* (forum tingkat menteri) yang lebih aktif menjalankan kinerja, meskipun tetap dibawah dalam kerjasama "*Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation between Republic of Indonesia and the Republic of Korea*"

Daftar Pustaka

Buku

Little, Richard and Smith Michael. 2006. *Perspective on World Politics*. London and New York : Routledge Taylor & Francis Group.

Yoon, Yang Seung dan Mohtar Mas' oed. 2005. *Memahami Politik Korea*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Yoon, Yang Seung. 2005. *40 Tahun 1966-2005 Hubungan Indonesia-Korea Selatan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Jurnal

Marie, Claude Poirier. "*Towards Green Korea? Assessing South Korea's Energy Security From Diversification to Diplomacy(Online)*", dalam https://yonseijournal.files.wordpress.com/2012/08/p27_1.pdf. diunduh pada tanggal 28 Maret 2017.

Setiawan, Sigit. "*Dampak Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN-KOREA FTA (AKFTA) Terhadap Indonesia dan Korea Selatan (Online)*", dalam http://www.Kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkrb_02.%20Dampak%20AKFTA.pdf, diunduh pada tanggal 29 Maret 2017.

Internet

"Akses ke dalam Pasar Korea Selatan Persyaratan Wajib yang harus di Penuhi",

dalam inatrims.kemendag.go.id/en/product/detail/persyaratan-wajib-harus-dipenuhi_737/?market=ko, diakses pada tanggal 29 Maret 2017.

“Berita Industri Kemenperin Usul Negosiasi Dipercepat”, dalam www.kemenperin.go.id/artikel/9977/kemenperin-Usul-Negosiai-Dipercepat diakses pada tanggal 29 Maret 2017.

“Indonesia-Korsel Meneken Kerjasama Industri Tekstil”, dalam www.kemenperin.go.id/berita/37-umum/3275-indonesia-korea-sepakat-meneken-kerjasama-industri-tekstil, diakses pada tanggal 01 november 2016.

“Kerjasama Ekonomi”, dalam kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/201301-07-15-02-52/ekonomi, diakses pada tanggal 9 Januari 2016.

“Laporan Atase Perdagangan Indonesia-Korea Selatan Januari-Mei 2012 Laporan Atdag KBRI Seoul” dalam www.kemendag.go.id, diakses pada tanggal 12 Maret 2017.

“Laporan Atase Perdagangan Indonesia-Korea Selatan Januari-Mei 2011 Laporan ITPC Busan”, dalam www.kemendag.go.id, diakses pada tanggal 12 Maret 2017.

“Perkembangan Perdagangan Indonesia–Korea Selatan Periode Januari-Desember 2013 Laporan ITPC Busan”, dalam www.kemendag.go.id/files/pdf, diakses pada tanggal 17 Februari 2016.

“Perkembangan Perdagangan Indonesia–Korea Selatan Periode Januari-Desember 2014 Laporan ITPC Busan”, dalam www.kemendag.go.id/files/pdf, diakses pada tanggal 20 Februari 2016.

“Perkembangan Perdagangan Indonesia-Korea Selatan Periode Januari-Desember 2015 Laporan Atdag Seoul”, dalam www.kemendag.go.id/files/pdf diakses pada tanggal 17 Oktober 2016.

“Pertemuan Komite Bersama Kerjasama Ekonomi Indonesia Korea ke-3”, dalam www.ekon.go.id diakses pada tanggal 15 Februari 2016.

“Sejarah Hubungan Diplomatik”, dalam idn.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/idn/bilateral/politik/sejarah/index diakses pada tanggal 12 Februari 2016.

Publikasi, artikel

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia “*Laporan Bulanan Februari Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional tahun 2014*”, dalam <http://ppid.kemendag.go.id/berkas/informasi/lapbul%20DJKPI%20Februari%202014.pdf>, diunduh pada tanggal 29 Maret 2017.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia “*Laporan Bulanan Mei 2011*”

Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional”, dalam <http://ppid.kemendag.go.id/berkas/informasi/5%20lapbul%20Mei%202011.pdf>, diunduh pada tanggal 6 Maret 2017

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia “*Laporan Bulanan Oktober 2011 Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional*”, dalam <http://ppid.kemendag.go.id/berkas/informasi/10%20lapbul%20oktober%202011.pdf>, diunduh pada tanggal 9 Maret 2017

“Perkembangan Perdagangan Indonesia-Korea Selatan periode Januari-Desember 2013 Laporan ITPC Busan”, dalam www.kemendag.go.id/files/pdf, diunduh pada tanggal 12 Maret 2017.

“Perkembangan Perdagangan Indonesia-Korea Selatan periode Januari-Desember 2014 Laporan ITPC Busan”, dalam www.kemendag.go.id/files/pdf, diunduh pada tanggal 12 Maret 2017.

“Perkembangan Perdagangan Indonesia-Korea Selatan periode Januari-Desember 2015 Laporan ITPC Busan”, dalam www.kemendag.go.id/files/pdf, diunduh pada tanggal 12 Maret 2017.

Siaran Pers Kementerian Perdagangan Republik Indonesia “*Indonesia-Korea Masuki Babak Baru Kerjasama Perdagangan*”, dalam <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/07/12/jakarta-indonesia-korea-masuki-babak-baru-kerja-sama-perdagangan-id1-1353753967.pdf> diunduh pada tanggal 1 April 2017

Skripsi

Diani, Mahyar. 2014. “*Strategi Multi Track Diplomacy Dalam Kerjasama Ekonomi Industri Korea Selatan (ROK) Terhadap Indonesia Tahun 2006-2012*”. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.